

Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pemerintahan Sebagai Upaya Tercapainya *Affirmative Action*

¹Advent Pesah Victoria Supit, ²Zakiya Ayu Nisa, ³Abdul Jabbar

¹Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

²Pendidikan Tata Kecantikan, Universitas Negeri Semarang

³Ilmu Lingkungan, Universitas Negeri Semarang

Email korespondensi: adventsupit01@students.unnes.ac.id

Abstract

Since birth, humans have been attached to human rights as rights; they have to be recognized and respected and aimed at realizing the human values given by God Almighty. Equality is a form of human rights; women and men have the same role in government. The government has established a policy for women's representation in government at a minimum of 30%. The real data in Kemiri Village is that women's involvement in government and village organizations has not yet reached 30%. Therefore, it is necessary to increase women's participation in Kemiri Village. The Kemiri Village UNNES KKN Team collaborates with youth organizations at the Gondang Satriyan for One Association (PEGASUS). The method used is the case study stage, which is conducted by searching for data and discussions with related parties. The second stage is outreach to youth organizations. As a result of this activity, women have an important role in government, with their privileges. The discussion form also allowed young people to practice expressing their opinions. This outreach is hoped to be a step toward increasing women's involvement in government.

Keyword :

Representation, Women, Politics, Socialization

Abstrak

Manusia sejak lahir telah melekat dengan hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki untuk diakui dan dihormati serta bertujuan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesetaraan merupakan salah satu wujud Hak Asasi Manusia, perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama dalam pemerintahan. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk keterwakilan perempuan dalam pemerintah minimal sebanyak 30%. Data nyata yang terdapat di Desa Kemiri yaitu keterlibatan perempuan dalam pemerintah dan organisasi desa belum mencapai 30%. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan partisipasi perempuan di Desa Kemiri. Tim KKN UNNES Desa Kemiri bekerjasama dengan pemuda-pemudi karang taruna pada Perkumpulan Gondang Satriyan Untuk Satu (PEGASUS). Metode yang digunakan yaitu tahapan studi kasus dengan mencari data dan diskusi dengan pihak terkait, tahap kedua sosialisasi kepada pemuda-pemudi karang taruna. Hasil dari kegiatan ini perempuan memiliki peranan penting terlibat dalam pemerintahan, dengan keistimewaan yang dimiliki. Bentuk diskusi yang dilakukan juga membawa pemuda-pemudi berlatih menyampaikan pendapat. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat menjadi langkah peningkatan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan.

Kata Kunci :

Keterwakilan, Perempuan, Politik, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Tuhan Sang Pencipta menciptakan manusia berwujud laki-laki dan perempuan yang menyebabkan adanya perbedaan. Perbedaan inilah yang menjadi upaya bahwa manusia diciptakan untuk saling menjaga dan menghormati (Damayanti & Rismaningtyas, 2021). Manusia sejak lahir telah melekat dengan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang dimiliki untuk diakui dan dihormati serta bertujuan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa (Arifin & Lestari, 2019). Negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (2) telah mengatur bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pernyataan ini dapat menjadi landasan kebebasan diskriminasi bagi struktural maupun sistematis dalam kehidupan diberbagai aspek (Adam *et al.*, 2022). Kondisi ini membuat adanya diskriminasi gender yang seringkali sebagai pembeda kekuatan atau pandangan masyarakat, terutama pada perempuan (Zuhri & Amalia, 2022). Adanya perbedaan gender mempengaruhi kehidupan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat di segala bidang (Steelfisher *et al.*, 2019). Salah satu fenomena yang terjadi saat ini yaitu perbedaan dalam dunia politik atau pemerintahan. Ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki telah terjadi kesenjangan politik yang cukup signifikan mencapai lebih dari 77% (Hessami & Fonseca, 2020)). Rendahnya keterwakilan dan kurangnya partisipatif menyebabkan adanya kesenjangan politik, yang mana kepentingan perempuan tidak tercermin dalam bidang pengambilan keputusan politik sehingga menyebabkan berkurangnya visibilitas dan suara politik (Grasso & Smith, 2022). Dalam hal ini, perempuan juga memiliki hak dalam berpolitik sebagai hak asasi manusia yang dimilikinya (Mlambo & Kapingura, 2019). Partisipasi perempuan memiliki potensi yang besar dalam upaya pemberdayaan perempuan (Alemu *et al.*, 2022). Pentingnya kesetaraan gender sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ingin dicapai pada tahun 2030 terkait dengan kesempatan yang sama dalam hal kepemimpinan dan tingkat pengambilan keputusan di bidang politik (Milazzo & Goldstein, 2019).

Desa Kemiri merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Desa Kemiri memiliki luas sekitar 184.6315 Ha yang terletak sebelah utara berbatasan dengan Desa Sudimoro, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pomah, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sedayu, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Bono. Desa Kemiri memiliki jumlah penduduk sekitar 2.431 orang yang terbagi menjadi laki-laki sebanyak 1.204 orang dan perempuan sebanyak 1.227 orang. Desa Kemiri memiliki penduduk dengan usia lebih dari 17 tahun sejumlah 1.741 orang. Jumlah penduduk ini menggambarkan bahwa mencapai 70% penduduk Desa Kemiri memiliki hak suara dan sudah tercatat sebagai penduduk Indonesia yang dapat terlibat aktif dalam berbagai bidang. Desa Kemiri memiliki 8 perangkat desa 2 diantaranya adalah perempuan sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan. Melalui data yang ada dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di dalam Pemerintahan Desa Kemiri baru 25%. Selain itu, Desa Kemiri memiliki pengurus karang taruna sejumlah 24 orang yang terdiri dari 7 perempuan dan 17 laki-laki. Kondisi ini bisa menjadi bukti bahwa keterwakilan perempuan dalam keikutsertaannya menjadi bagian dalam pemerintahan ataupun keterlibatan dalam organisasi masih minim. Kondisi ini juga dapat dinilai bahwa kuota keterwakilan perempuan dalam kebijakan afirmasi atau *affirmative action* sebanyak 30% belum bisa terpenuhi (Alemu *et al.*, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman sebagai upaya membangun pondasi masyarakat bahwa partisipasi perempuan dalam politik sangat diperlukan. Tujuan dilakukan sosialisasi ini adalah untuk menambah wawasan pemuda-pemudi desa mengenai peranan perempuan dalam keterlibatan politik serta untuk mengetahui besarnya keberanian peserta dalam menyampaikan pendapat dan pandangannya.

METODE

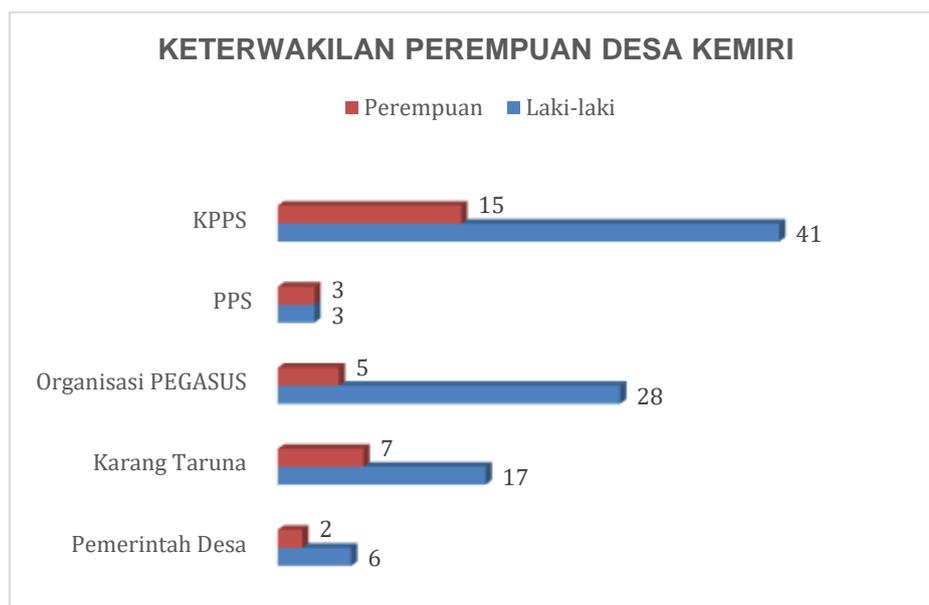
Kegiatan “Sosialisasi Partisipasi Perempuan Dalam Pemerintahan” dilaksanakan di Poskamling RT. 04 Dukuh Satriyan, Desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten pada hari Minggu, 7 Januari 2024. Kegiatan ini berlangsung atas kerjasama antara pihak KKN

Universitas Negeri Semarang (UNNES) Desa Kemiri dengan pemuda-pemudi karang taruna pada Perkumpulan Gondang Satriyan Untuk Satu (PEGASUS). Jumlah audiens yang ditargetkan dapat tercapai yaitu sejumlah 30 orang menghadiri perkumpulan tersebut dan mengikuti kegiatan sosialisasi dari awal hingga akhir.

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan metode diskusi dengan model *Focus Group Discussion (FGD)* antara peserta dengan narasumber untuk bertanya terkait materi partisipasi politik pada perempuan serta pandangan narasumber mengenai fenomena keterwakilan perempuan dalam politik yang terjadi saat ini. Pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Partisipasi Perempuan Dalam Pemerintahan” dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) tim KKN UNNES Desa Kemiri melakukan studi kasus untuk mengidentifikasi persoalan mitra berupa diskusi dengan Kepala Sie Bidang Pemerintahan di Balai Desa Kemiri terkait partisipasi politik perempuan, 2) tim KKN UNNES Desa Kemiri melakukan sosialisasi kepada pemuda-pemudi karang taruna untuk mengetahui wawasan mengenai peranan perempuan dan meningkatkan partisipasi dan keaktifan peserta dalam menyampaikan pandangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pertama yang Tim KKN UNNES Desa Kemiri lakukan adalah studi kasus. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari data dan berdiskusi dengan Kepala Sie Bidang Pemerintahan Desa Kemiri, sekaligus Pendamping Karang taruna Desa Kemiri yang dilakukan di Balai Desa. Pertemuan ini membahas mengenai partisipasi perempuan di Desa Kemiri berhubungan dengan pemerintahan ataupun organisasi, Hasil dari diskusi ini diketahui bahwa peran perempuan dalam keterlibatannya dalam organisasi dan juga pemerintahan masih terbilang minim. Perangkat Desa Kemiri hanya memiliki 2 pegawai dari 8 Perangkat Desa yang ada di Desa Kemiri. Selain itu studi kasus dilakukan juga dengan menghadiri kegiatan pertemuan Karang Taruna baik di tingkat dukuh maupun Desa. Pemuda yang hadir disetiap pertemuan yang ada dibawah 4 orang dan peserta yang lain adalah laki-laki, kondisi ini juga diperkuat dengan jumlah pengurus Karang Taruna, ditingkat Desa jumlah pengurus Karang Taruna 24 Orang dari jumlah tersebut terdapat 7 pengurus perempuan data ini diperoleh dari Ketua Karang Taruna Desa. Selain itu mengambil juga contoh kelompok Pemuda Pemuda dukuh Gondang dan Satriyan dari jumlah 33 anggota hanya terdapat 5 orang perempuan didalamnya. Partisipasi perempuan dalam bidang politik di Desa Kemiri dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Keterwakilan Perempuan Desa Kemiri
(Sumber Gambar : Ketua PPS Desa Kemiri)

Melalui data tersebut dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan tidak ada setengah dari jumlah anggota laki-laki. Selain itu, dilakukan juga jajak pendapat dengan beberapa pemuda karang taruna, berdiskusi juga mengenai peran perempuan di pemerintahan, dan paling kecil di organisasi respon atau tanggapan yang diperoleh beberapa tidak berpendapat dan terdapat juga pendapat yang menyatakan perempuan tidak harus ada dalam organisasi. Pada tahap studi kasus ini Tim KKN UNNES memperbanyak ngobrol santai dengan Ketua Karang Taruna mengenai partisipasi pemuda desa. Setelah dilakukannya tahapan studi kasus ini, Tim KKN UNNES Desa Kemiri menarik kesimpulan untuk mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kemiri. Sosialisasi ini memiliki sasaran kepada pemuda-pemudi Desa mengingat mereka memiliki peranan penting dalam peningkatan partisipasi perempuan. Sosialisasi ini sebelumnya telah dilakukan diskusi dan koordinasi terlebih dahulu dengan Ketua Karang Taruna Desa Kemiri.

Tahapan Sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 11.30 WIB. Sosialisasi ini mengambil topik besar mengenai partisipasi perempuan. Tim KKN UNNES menyampaikan materi sosialisasi seputar keterwakilan perempuan di Indonesia, materi yang disampaikan juga mengenai pemerintah memiliki kebijakan *affirmative action* yang bertujuan untuk mengurangi diskriminasi gender. Pada Sosialisasi di tanggal 7 Januari 2024 ini Tim KKN UNNES juga menekankan mengenai keterlibatan perempuan dalam ranah pemerintahan. Setelah materi disampaikan, dilakukan diskusi singkat mengenai pandangan pemuda-pemudi desa dengan topik “Pentingnya peran perempuan dalam pemerintah atau organisasi”.



Gambar 2. Penyampaian Topik *Focus Group Discussion*
(Sumber Gambar : Dokumentasi Pribadi)

Topik yang dilemparkan ini kepada audiens membuka 3 pendapat dari Pemuda-Pemudi PEGASUS. Pendapat pertama disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Desa “Peran perempuan di pemerintahan penting, perempuan mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki, hal kecilnya adalah tentang kedisiplinan dalam mengerjakan tugas. Perempuan yang selalu mengumpulkan pertama”. Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Desa menjadi pembuka adanya pendapat selanjutnya. Anggota PEGASUS juga memberikan pendapat “Sepakat dengan apa yang disampaikan sebelumnya, perempuan penting perannya dalam pemerintahan, organisasi. Ketelitian yang dimiliki perempuan menjadi nilai plus”. Penyampaian pendapat ini disampaikan oleh perwakilan laki-laki. Pendapat ketiga disampaikan oleh perwakilan pemuda PEGASUS yang menyampaikan bahwa “Perempuan punya peran untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan penting. Sekarang sudah wajar untuk kesetaraan gender, jadi penting peran perempuan”. Pendapat dari ketiga perwakilan PEGASUS ini membuka pandangan anggota PEGASUS lainnya tentang pentingnya perempuan terlibat dalam pemerintahan. Kegiatan sosialisasi dan diskusi yang diikuti oleh 25 Orang yang terdiri dari 4 perempuan dan 21 laki-laki ini juga dilaksanakan sebagai langkah

awal adanya antusias, keterlibatan pemuda-pemudi untuk berani menyampaikan aspirasi, pandangan, dan pendapatnya di forum.



Gambar 3. Sesi Dokumentasi Kegiatan
(Sumber Gambar : Dokumentasi Pribadi)

Pada akhir sosialisasi ini, Tim KKN UNNES menutup dengan *closing statement* yang menekankan kembali tentang kesetaraan baik laki-laki dan perempuan bahwa memiliki peran yang sama dalam pemerintahan dan bidang lainnya, dan mengajak meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan, lingkup kecil organisasi desa.

KESIMPULAN

Keterwakilan perempuan dalam politik dan parlemen memiliki peran penting dalam upaya Pembangunan, khususnya yang berhubungan dengan perempuan. Namun, berbagai hambatan masih saja menjadi penghambat perempuan untuk maju ke ranah politik. Maka dari itu, sudah seharusnya diskriminasi atas perempuan dihilangkan. Peningkatan keterwakilan perempuan tidak dapat terlepas juga dari bantuan dan partisipasi seluruh kalangan masyarakat. Pemerintah juga telah membuat kebijakan *affirmative action* yang dapat menjadi landasan dalam melangkah kedepan. Namun, implementasi *affirmative action* belum dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengertian atau penyampaian kepada masyarakat tentang *affirmative action* ini, bahkan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang *affirmative action*. Maka dari itu, dibutuhkan adanya kepekaan dari masyarakat akan pentingnya toleransi, menghormati, dan menaati aturan yang berlaku. Usaha meningkatkan keterwakilan perempuan bukan hanya tugas perempuan saja, namun seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk dapat harus bersatu dan berkomitmen bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Kemiri yang telah memfasilitasi kegiatan, pengurus karang taruna dan organisasi PEGASUS serta seluruh anggota yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan acara, seluruh anggota Tim KKN UNNES Desa Kemiri yang telah membantu menyiapkan acara, dosen pembimbing Abdul Jabbar, S.Si., M.Ling. dan Universitas Negeri Semarang yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan KKN ini.

REFERENSI

Adam, C., Grohs, S., & Knill, C. (2022). Discrimination based on political beliefs: A field experiment on the freedom of assembly. *Public Policy and Administration*, 37(3), 261-282. <https://doi.org/10.1177/0952076720905012>

- Alemu, A., Woltamo, T., & Abuto, A. (2022). Determinants of women participation in income generating activities: evidence from Ethiopia. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1), 66. <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00260-1>
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Damayanti, D., & Rismaningtyas, F. (2021). Pendidikan berbasis responsif gender sebagai upaya meruntuhkan segregasi gender. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10. 60-75. <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47639>
- Grasso, M., & Smith, K. (2022). Gender inequalities in political participation and political engagement among young people in Europe: Are young women less politically engaged than young men?. *Politics*, 42(1), 39-57.
- Hessami, Z., & da Fonseca, M. L. (2020). Female political representation and substantive effects on policies: A literature review. *European Journal of Political Economy*, 63, 101896.
- Milazzo, A., & Goldstein, M. (2019). Governance and women's economic and political participation: Power inequalities, formal constraints and norms. *The World Bank Research Observer*, 34(1), 34-64.
- Mlambo, C., & Kapingura, F. (2019). Factors influencing women political participation: The case of the SADC region. *Cogent Social Sciences*, 5(1), 1681048.
- SteelFisher, G. K., Findling, M. G., Bleich, S. N., Casey, L. S., Blendon, R. J., Benson, J. M., ... & Miller, C. (2019). Gender discrimination in the United States: Experiences of women. *Health services research*, 54, 1442-1453.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). *Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia*. 5(1), 17-41.